

## PELUNCURAN SEPEDA MOTOR LISTRIK DI KENDARI

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (kiri) dan Direktur Utama PT WIKI Industri Manufaktur Muhammad Samyarto (tengah) saat peluncuran penjualan perdana sepeda motor listrik merk GESITS di MTQ Square di Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu (27/2). PT WIKI Industri Manufaktur (WIMA) meluncurkan sepeda motor listrik berbasis baterai buatan dalam negeri bernama GESITS.



## Indonesia-Jepang Terus Perkuat Kerja Sama Industri Manufaktur

Salah satu perusahaan ternama asal Negeri Sakura, Toyota Group menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia sebesar USD2 miliar dan berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dengan memproduksi mobil hibrida dan listrik.

**JAKARTA (IM)** - Indonesia dan Jepang terus berupaya meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif, khususnya di sektor industri. Sinergi kedua negara ini diharapkan membawa dampak positif dalam membangkitkan gairah usaha di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Jepang merupakan salah satu negara mitra strategis bagi Indonesia. Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang untuk sektor nonmigas pada periode 2014-2019 cenderung naik dengan pertumbuhan sebesar 5,06 persen," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, seperti dilansir dari laman Kemenperin, Minggu (28/2).

Beberapa waktu lalu, Menperin Agus melakukan pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Kanasugi Kenji. "Kami mendorong agar para pelaku industri Jepang dapat aktif berinvestasi di Indonesia. Apa-

lagi, Pemerintah Indonesia bertekad menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan izin dan berbagai insentif yang menarik," tutur Agus.

Pada tahun 2019, nilai investasi Jepang di Indonesia sebesar USD4,31 miliar. Sedangkan, pada periode Januari-November 2020 mencapai USD2,58 miliar. "Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan. Tidak saja Indonesia, namun seluruh dunia mengalaminya," ungkap Agus.

Salah satu perusahaan ternama asal Negeri Sakura, Toyota Group menyatakan minatnya berinvestasi di Indonesia sebesar USD2 miliar dan berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dengan memproduksi mobil hibrida dan listrik.

Terkait fenomena kebijakan beberapa negara yang merelokasi pabriknya dari RRT ke negara lain, perusahaan Jepang juga melakukan

relokasi ke negara lain, khususnya Indonesia. Dari total tujuh perusahaan multinasional, terdapat tiga perusahaan Jepang yang akan merelokasi pabriknya dari RRT ke Indonesia, yaitu Panasonic Manufacturing (senilai USD30 juta), Denso (USD138 juta) dan Sagem Indonesia (USD50 juta). Sementara itu, ekspor sektor nonmigas Indonesia ke Jepang sepanjang tahun 2014-2019 mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,23 persen. Pada 2019, nilai pengapalan Indonesia ke Jepang untuk sektor nonmigas mencapai USD13,8 miliar.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto mengemukakan, pihak Indonesia dan Jepang sepakat akan melakukan kerja sama di bidang pengembangan sektor industri melalui program New Manufacturing Industry Development Center

(New MIDECC). Program itu berisikan kerangka proyek kerja sama yang meliputi enam sektor strategis, yaitu industri otomotif, elektronik, kimia, tekstil, makanan dan minuman, serta logam. Program New MIDECC akan dilaksanakan pada tujuh bidang lintas sektor yang meliputi metal working, mold & dies, welding, energy conservation, SME development, export promotion, dan policy reforms.

Dubes Kanasugi berharap peningkatan kerja sama dengan Indonesia-Jepang dapat mewujudkan banyak hal positif. "Contohnya pandemi Covid-19 saat ini, tantangan kita bersama untuk saling berbagi kearifan," tuturnya.

Misalnya, guna mengatasi masalah ekonomi, kedua negara akan terus bergandengan tangan baik bagi kemajuan Indonesia maupun revitalisasi perekonomian Jepang dengan memanfaatkan kekuatan ma-

asyarakat Indonesia khususnya generasi muda.

"Untuk membuat hubungan yang saling menguntungkan, kami selalu menanamkan semangat untuk bisa bermanfaat baik bagi masyarakat Indonesia maupun Jepang. Kami juga berupaya mendukung aktivitas perusahaan Jepang di Indonesia," papar Kenji.

Menurutnya, Jepang dan Indonesia memiliki ikatan sejarah tersendiri yang begitu kuat, terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia merupakan kekuatan perekonomian besar di kawasan sebagai anggota G20. "Selain itu, dengan adanya sekitar 2.000 perusahaan Jepang di Indonesia, Jepang selama ini turut berkontribusi besar bagi kemajuan perekonomian Indonesia, seperti melalui penciptaan lapangan kerja dan perluasan ekspor," tandasnya. • dro

## Menteri Basuki Beberkan Keuntungan Food Estate

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mencapai target pembangunan infrastruktur guna membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peningkatan belanja negara. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama masa pandemi adalah pengembangan dan pengelolaan lumpung pangan (food estate).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Untuk menghadapi tantangan ini, Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate berkelanjutan.

"Ini sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak Pandemi Covid-19," ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (28/2).

Dijelaskan Basuki, saat ini Kementerian PUPR tengah mengembangkan food estate seluas 165.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Di samping itu, telah diprogramkan kegiatan pengembangan food estate di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan nasional.

Menurut dia, dalam pengembangannya tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara garis besar tantangan tersebut meliputi tata kelola air, eko-

nomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan dan pembiayaan.

"Di masing-masing lokasi pengembangan food estate pasti memiliki karakter dan tantangan yang berbeda-beda. Di Kalimantan Tengah kita revitalisasi lahan eks-PLG yang bukan lahan gambut, tetapi alluvial seluas 165.000 ha. Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Di sini kita prioritaskan penanganan drainasenya sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami," jelas Basuki.

Sementara di Sumatera Utara dan NTT yang merupakan lahan kering difokuskan pada irigasinya menggunakan gun sprinkler.

"Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan," imbuhnya. • dot

## Kemendag dan Aprindo Tanda Tangan Perjanjian Kerja Sama

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan perdagangan berjangka komoditas (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK) untuk mempersingkat rantai perdagangan. Salah satunya dengan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di kantor Bappebti, Jumat (26/2) lalu.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Kepala Bappebti Sidharta Utama dan Ketua Aprindo Roy Mandey. Penandatanganan disaksikan oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar Sutriyono Edi, Sekretaris Jenderal Aprindo Solihin.

"Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, para pelaku usaha di dunia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan komoditas atau produk yang dibutuhkan. PBK, SRG, dan PLK diharapkan dapat mempersingkat mata rantai perdagangan dan mendorong pelaku usaha agar lebih profesional dalam memproduksi," ujar Jerry, dilansir dari laman Kemendag, Minggu (28/2).

Jerry menjelaskan, pengembangan PBK, SRG dan PLK akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan sektor industri dan perdagangan yang berbasis sumber daya lokal. Selain itu, juga akan memberikan efek positif kepada produsen komoditas seperti petani, peternak, nelayan, dan masyarakat lainnya.

datanganan perjanjian kerja sama ini dapat meningkatkan pemahaman tentang PBK, SRG, dan PLK. Sehingga, ketiga sistem tersebut dapat disinergikan dan diimplementasikan dengan optimal oleh para pelaku usaha ritel," kata Jerry.

Jerry mengatakan, Aprindo merupakan mitra strategis Kementerian Perdagangan dalam mengoptimalkan peran PBK, SRG, dan PLK. Sebab, Aprindo merupakan wadah perkumpulan yang beranggotakan perusahaan-perusahaan ritel lokal dan nasional.

Kepala Bappebti Sidharta Utama menambahkan, penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilandasi semangat gotong royong. Aprindo dengan jumlah anggota dan jaringan ritelnya yang luas di seluruh Indonesia dapat membantu para petani komoditas pangan, perkebunan, atau kelautan. Salah satunya, dengan mengambil produk komoditasnya dari SRG atau PLK.

"Para pelaku usaha nantinya bisa mendapatkan produk-produk yang berkualitas melalui SRG dan PLK. Sementara itu, para petani mendapatkan kepastian pasar dari produk yang dihasilkan. Misalnya, bawang merah dari Brebes, kopi Gayo dari Aceh, dan cokelat dari Makassar," ujar Sidharta.

Ia mengungkapkan, ketersediaan pasokan dalam mata rantai perdagangan adalah suatu keunggulan. Selain itu, manajemen logistik yang dikelola secara rapi dan tepat waktu dalam pengiriman dapat menurunkan biaya logistik secara nasional. Hal itu akan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat regional dan internasional. • pan



**KENAikan ANGGARAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**  
Perajin membuat bata di Kampung Karundang, Cipocok Jaya, Serang, Banten, Minggu (28/2). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk mempercepat pemulihan ekonomi pemerintah menaikkan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari Rp579 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp599,43 triliun tahun 2021 antara lain digunakan untuk menambah volume KUR (Kredit Usaha Rakyat) guna membangkitkan kembali para pelaku usaha kecil yang terdampak pandemi.

**BPR SUPRA**

**PULAUINTAN**  
General Contractor

**PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA**  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

**01019** KODE NEGARA KODE AREA No Telepon yang dituju OK/Yes  
Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxx

**01019** Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes  
Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxx

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNG  
Customer Service : 021-634 5009  
Mobile : 0811 17 50 291-95  
SMS : 0811 17 50 369  
E-mail : support@gaharu.co.id

## Ini Penjelasan Kementerian BUMN Soal Rencana Merger Pelindo I-IV

**JAKARTA (IM)** - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) direncanakan akan dijadikan satu antara PT Pelindo I, PT Pelindo II, PT Pelindo III dan PT Pelindo IV, atau yang dikenal dengan sebutan merger. "Jadi keinginan kita Pak Jokowi, tol laut itu akan semakin cepat terlaksana. Ketika ide besar membangun sebuah kekuatan, menyatukan Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV dalam sebuah perusahaan, di-merger," ujar Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga, dalam siaran YouTube Kementerian BUMN RI, Sabtu (27/2).

Ia menjelaskan, penggabungan empat kekuatan perusahaan ini akan membuat aset serta standar operasional. Sehingga dari Sabang sampai Merauke akan berada pada satu sistem. Kemudian, saat ini pindah pelabuhan juga berarti pindah sistem yang menyebabkan banyak keterlambatan dan banyak hal prosedural yang harus dilalui.

"Maka itu, merger PT Pelindo dipercaya dan diharap-

kan akan membantu logistik nasional menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien," ujarnya.

Sementara Direktur Utama Pelabuhan Indonesia II (Persero) Arif Suhartono mengatakan, pihaknya menyambut baik rencana merger perusahaan pengelola pelabuhan milik pemerintah itu. Menurutnya, merger Pelindo I hingga Pelindo IV bisa mengurangi biaya logistik di Indonesia. "Jadi kami (Pelindo II), sangat mendukung ide tersebut. Pasalnya merger ini akan sangat untung apabila logistic cost juga bagus," ujar dia di antara sama.

Dia mengatakan, dampak merger tidak hanya mengurangi biaya logistik, melainkan juga berdampak baik untuk performance pelabuhan di Indonesia. Maka itu, klaster peti kemas, non-peti kemas, marine, logistik, dan cluster equipment pengelolaannya akan menjadi satu manajemen. "Maka itu, dari sisi ekonomi adalah bagaimana menjadikan pelabuhan tersebut menjadi pelabuhan yang secara performance tinggi dan reliable," ungkap dia. • pan

## Batasan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk UMK Naik Jadi Rp15 Miliar

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah meningkatkan peran usaha mikro kecil (UMK) dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa. Batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil dan koperasi pun meningkat menjadi Rp15 miliar atau naik enam kali lipat dari sebelumnya hanya Rp2,5 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No 12 Tahun 2021 berlaku mulai sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 2 Februari 2021.

"Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan tertulis Sabtu (27/2).

Ia mengatakan, batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp15 miliar.

Melalui PP No 7 Tahun 2021, pemerintah mewajibkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40% untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres No 12 Tahun 2021. "Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi," kata Teten.

Sementara batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp15 miliar. • hen